

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, KEMANDIRIAN
DAERAH, DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN
DAERAH TERHADAP BELANJA FUNGSI
PENDIDIKAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2017-2019**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

RENDY ANANDA PUTRA
B 200170289

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, KEMANDIRIAN
DAERAH, DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN
DAERAH TERHADAP BELANJA FUNGSI
PENDIDIKAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Oleh:

RENDY ANANDA PUTRA
B 200170289

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Indarti Diah Palupi, S.E., M.Si., Akt, CA.
NIDN. 0625097403

HALAMAN PENGESAHAN

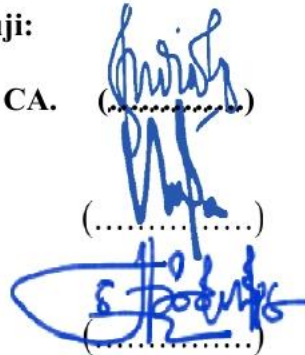
**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, KEMANDIRIAN
DAERAH, DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN
DAERAH TERHADAP BELANJA FUNGSI
PENDIDIKAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2017-2019**

**OLEH
RENDY ANANDA PUTRA
B 200170289**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 25 September 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan penguji:

1. Indarti Diah Palupi, S.E., M.Si., Akt, CA. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. N. Nisa N., S.E., M.Acc. Ak (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Shinta P.S., S.E., M.M. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan



Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E, M.Si
NIDN: 0616087401

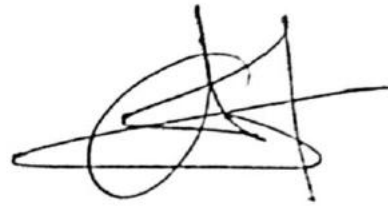
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 September 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

RENDY ANANDA PUTRA
B 200170289

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH, DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DI PULAU JAWA TAHUN 2017-2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah terhadap belanja fungsi pendidikan. Populasi penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang terdaftar di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel akhir sebanyak 65 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total data panel sebanyak 188 data. Pengujian data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan sedangkan kemandirian daerah dan pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan.

Kata Kunci: Belanja Fungsi Pendidikan, Dana Perimbangan, Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Abstract

This study aims to determine the effect of balancing funds, regional independence, and regional income growth on education function expenditures. The research population is all regencies/cities in Java that are registered with the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) in 2017-2019. The sampling technique used purposive sampling method with a final sample of 65 districts/cities. The data used in this study is secondary data sourced from the Budget Realization Report (LRA) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) with a total of 188 panel data. Testing the data using multiple linear regression. The results showed that the balancing fund had an effect on spending on education functions, while regional independence and regional income growth had no effect on spending on education functions.

Keywords: Education Function Expenditure, Balance Fund, Regional Independence, Regional Income Growth.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan di suatu negara. Pendidikan di Indonesia diatur pada pasal 31 UUD 1945. Pada ayat 1 diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 menyatakan bahwa

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Ayat 4 menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.

Menurut Kemendikbud (2019) salah satu langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menetapkan anggaran pendidikan yang lebih besar dari anggaran lainnya. Anggaran pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya 20% dari total APBN dan APBD, namun pada praktiknya masih jauh dari kenyataan. Data Kemendikbud, pada tahun 2019 menunjukkan ada sekitar lima pemerintah daerah (pemda) yang anggarannya sudah mencapai 20 persen. Kelima pemda itu adalah Kabupaten Banyuwangi 22,04 persen, Kabupaten Tasikmalaya 23,43 persen, Kabupaten Subang 23,92 persen, Kabupaten Wonogiri 24,08 persen, dan Kabupaten Bekasi 25,25 persen. Alokasi terendah ada pada Kabupaten Cirebon yang hanya 0,09 persen.

Cukup banyak pemerintah daerah yang berada di Pulau Jawa yang belum mampu mencapai 20 persen anggaran pendidikan, sehingga bisa dikatakan belum mencapai amanat undang-undang itu (Kemendikbud, 2019). Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu tinggi. Dana yang bersumber dari pusat akan dikelola pemerintah daerah dan akan dianggarkan menjadi belanja daerah untuk digunakan dalam memberikan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat, salah satunya dalam bentuk anggaran belanja pendidikan.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2004). Hal ini dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Anggaran pemerintah dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan

dengan peraturan daerah. Dalam organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah, anggaran bukan sebagai alat perencanaan saja, namun anggaran merupakan sebuah bentuk akuntabilitas dari pengelolaan dana publik yang dibebankan kepada pemerintah.

Pendanaan yang dianggarkan pemerintah daerah dalam rangka untuk mendukung maksimalnya pendidikan pada suatu daerah bisa berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja pendidikan merupakan salah satu jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan.

Dalam belanja pendidikan, anggaran yang dialokasikan dari APBD sekurang-kurangnya adalah 20% dari belanja daerah diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk pendidikan sebesar kurang lebih 20% ini tentunya memiliki arah kebijakan dalam peningkatan akses serta kualitas pendidikan. Pemerintah pusat juga membantu pemerintah daerah untuk memenuhi belanja daerahnya salah satunya dengan dana perimbangan.

Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004, dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan yang terdiri atas: 1) pendapatan asli daerah (PAD), 2) dana perimbangan, 3) pinjaman daerah, 4) lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja rutin maupun belanja dalam rangka pembangunan daerah. Pengembangan infrastruktur industri dan kemudahan investasi akan menyebabkan dampak yang positif dengan naiknya pendapatan asli daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) dalam Isminanda, Ayustika dan Bawon (2019) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil dari uji F pada penelitian ini, nilai signifikansi F sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, bahwa variabel independen yaitu dana perimbangan, kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah berpengaruh terhadap variabel dependen belanja fungsi pendidikan.

Tabel 1. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-211779755543.101	53310656265.483		-3.973	.000
Dana Perimbangan	.685	.035	.822	19.635	.000
Kemandirian Daerah	-4783459.449	6496553.255	-.031	-.736	.462
Pertumbuhan Pendapatan Daerah	280919438059.890	350083448086.913	.034	.802	.423

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan pengujian tabel diatas, pengujian secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut: Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 19,635 dan nilai t-tabel sebesar 1,97331 sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($19,635 > 1,97331$). Tabel diatas juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -0,736 dan nilai t-tabel sebesar 1,97331 sehingga $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($-0,736 < 1,97331$). Tabel diatas juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,462 > 0,05$. Hal ini

menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,802 dan nilai t-tabel sebesar 1,97331 sehingga $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,802 < 1,97331$). Tabel diatas juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,423 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan.

Untuk melihat nilai pengaruh antara variabel dependen dan independen dapat dilihat dari Adjusted R Square dimana dalam penelitian ini Adjusted R Square dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,829 ^a	0,687	0,682	248397806877.0026600

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel diatas nilai adjusted R Square (Koefisien Determinasi) diatas menunjukkan nilai sebesar 0,682 atau 68,2%. Menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel inpenden dana perimbangan, kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah terhadap variabel dependen belanja fungsi pendidikan sebesar 68,2%, sedangkan 31,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar delapan variabel bebas tersebut yang tidak dimasukkan kedalam model.

3.2 Pembahasan

Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya dana perimbangan dapat memberikan dampak peningkatan belanja fungsi pendidikan. Apabila pemerintah daerah di Indonesia memfokuskan pada peningkatan dana perimbangan, maka belanja fungsi pendidikan daerah tersebut juga akan meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan kemandirian daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiawan dan Nanda (2017) bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan.

Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya kemandirian daerah tidak memberikan dampak terhadap peningkatan belanja fungsi pendidikan. Hasil ini

membuktikan bahwa dengan meningkatnya kemandirian daerah tidak memberikan dampak terhadap peningkatan belanja fungsi pendidikan. Hal ini merupakan bukti adanya kecenderungan pemerintah daerah tidak menggunakan PAD sebagai sumber pendanaan untuk pendidikan. Sejatinya, pajak daerah digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan. Hasil penelitian terhadap kemandirian daerah ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdulah et al., (2019) bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja fungsi Pendidikan.

Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa pengaruh pertumbuhan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya pengaruh pertumbuhan daerah tidak memberikan dampak terhadap peningkatan belanja fungsi pendidikan. Pendapatan daerah merupakan sumber utama pendanaan untuk belanja daerah, termasuk belanja pendidikan. Ketika regulasi mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya sebesar 20 persen untuk pendidikan, dengan asumsi sumber pendanaan lain konstan, maka pertumbuhan pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap besaran anggaran belanja pendidikan. Artinya, pertumbuhan pendapatan daerah memiliki korelasi positif dengan persentase relatif belanja pendidikan. Namun, hasil penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh signifikan pertumbuhan pendapatan daerah terhadap belanja fungsi pendidikan. Hasil penelitian terhadap pertumbuhan pendapatan daerah ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdulah et al., (2019) bahwa pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Pendidikan.

4. PENUTUP

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan, maka H_0 ditolak. Hal ini didukung oleh terbuktinya H_1 yang diterima. Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan, kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan, maka H_0 diterima. Hal ini didukung oleh terbuktinya H_2 yang ditolak. Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan, pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan

terhadap belanja fungsi ekonomi, maka H_0 diterima. Hal ini didukung oleh terbuuktinya H_3 yang ditolak.

Setelah menganalisis hasil penelitian ini maka, saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut, Menambah tahun penelitian agar tidak terfokus pada tahun tersebut saja. Memperluas sampel agar tidak hanya terpaku pada Pulau Jawa saja yang menjadi sampel peneliti. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti menambahkan variabel independent lain, sehingga dapat diketahui faktor lain yang dapat mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan, seperti pendapatan asli daerah, sisa anggaran tahun lalu, kinerja keuangan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Afrah Junita. 2016. Bukti Empiris tentang Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. *Modus* 28 (2): 185-201.
- Abdullah, S. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Ringkasan Disertasi. Universitas Gajah Mada
- Amalia, F. R., Purbadharmaja, & BP, I. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(2303–178), 257–264
- Blais, André & Stéphane Dion. 1990. Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model & Its Critics. *Polity* 22(4): 655-674.w
- Durlauf, S. N., Johnson, P. A., & Temple, J. R. (2005). Growth Econometrics. In P. Aghion, & e. S N Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. IA). Amsterdam: North-Holland.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review* 14(1): 57-74.
- Faguet, Jean-Paul & Fabio Sanchez. 2008. Decentralization's Effects on Educational Outcomes in Bolivia And Colombia. *World Development* 36(7): 1294-1316.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta

- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2014). Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*. Vol.2, No.1 : 646-655.
- Nugraha, N., & Amelia, T. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2011 – 2014. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 20(1), 51.
- Peraturan Pemerintah NO. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.
- Peraturan Presiden No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, Desy Anita (2012) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang pajak dan retribusi daerah.
- Yunina, F., & Handayani, T. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1).